

ABSTRAK

Peningkatan pedagang kaki lima pada setiap tahunnya di Kabupaten Tasikmalaya menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan dengan beragam arsitektur, namun disisi lain tampak menjamur lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Taman dan ruang terbuka yang semula cukup tersedia, beralih rupa menjadi kawasan perdagangan. Keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya di instansi terkait yakni Satpol PP serta hambatan apa saja yang dihadapi dan agar dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan dengan tujuan mencari dan mengetahui penegakan hukum Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan serta wawancara sebagai bahan pelengkap

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya masih belum efektif dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang kaki lima

ABSTRACT

Improvement of street vendors in each year in Tasikmalaya region featuring double-face, on one side looks at a variety of architectural development, but on the other side looked mushrooming slums with facilities and infrastructure are inadequate to support continuity of human life. Park and public room which available previously became trading area. Its existence gives rise to many problems, especially with regard to public order offences. This research was conducted to find out the how law enforcement and to provide solutions in applying article 9 paragraph 6 of the Regulation Region of Tasikmalaya number 3 in 2014 about on the organization of public peace and order.

Research conducted using the kind of normative juridical research in solving of the problems that will be discussed, based on the regulations with the aim of knowing the law enforcement article 9 paragraph 6 local regulation number 3 in 2014. The methods of collecting the materials used are the literature studies and interview as complete material.

Based on the result of the research and discussion can be concluded that, law enforcement of local regulation of Tasikmalaya Region number 3 in 2014 about of street vendors in Tasikmalaya region still not effective due to several factors that affect law enforcement.

Keywords: Law enforcement, Local Regulation, Street vendors